



**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
SAMPAH DI TPA RANDEGAN KOTA MOJOKERTO:
TINJAUAN IMPLEMENTASI EDWARD III**

Fadllal Alimi, Muhammad Faza Zakiy Makarim,

Ario Dewandaru, Renata Arindya Ika Putri

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik,

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan, Kota Mojokerto, menggunakan model analisis implementasi Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto dengan masyarakat dan pengelola TPS di tingkat RT dan RW berjalan baik, namun perlu peningkatan dalam hal pengedaran informasi dan pemahaman masyarakat mengenai klasifikasi sampah. Dalam aspek sumber daya, ditemukan bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia kurang memadai meskipun sarana dan prasarana yang ada sudah mencukupi. Disposisi kebijakan menunjukkan bahwa penerimaan dan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh sikap dan perilaku para pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi yang ada di DLH, yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, dan tiga kepala bidang, sudah berfungsi dengan baik dalam hal pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antar departemen. Simpulan hasil penelitian yakni, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Randegan memerlukan perbaikan terutama dalam hal penambahan sumber daya manusia dan peningkatan efektivitas komunikasi. Peningkatan disposisi dan struktur birokrasi yang sudah baik dapat terus ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan sampah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, TPA Randegan.

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah tempat bagi para makhluk hidup termasuk manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lingkungan menyebabkan adanya suatu pengaruh baik positif maupun negatif terhadap kehidupan manusia, dan sebaliknya pola kehidupan manusia juga memberikan dampak baik positif dan negatif terhadap kehidupan manusia, (Effendi, 2018 :75). Pernyataan tersebut berarti manusia dan lingkungan hidup merupakan kedua hal yang saling bergantung dan berkorelasi satu sama lain. Seiring kehidupan manusia yang bergerak dari masa ke masa, pola dan cara hidup manusia yang berubah mempengaruhi pola lingkungan yang terjadi, hal tersebut karena adanya pergeseran aktivitas manusia seperti aktivitas industri, perdagangan, dan pertumbuhan penduduk sebagai bonus demografi yang tidak dapat dihindari. Salah satu permasalahan sebagai hasil aktivitas manusia dan masyarakat adalah sampah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008, nomor 18, mengenai pengelolaan sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan manusia sehari-hari yang berbentuk padat. Menurut Manik, (2007 :67), sampah adalah sebuah benda yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh manusia, dan sampah merupakan sisa hasil dari aktivitas manusia itu sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan sampah adalah sisa dari aktivitas manusia yang kehadirannya sudah tidak digunakan. Sampah dari aktivitas sisa tersebut harus ditangani atau dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut seperti permasalahan lingkungan yang kemudian merebak ke arah

permasalahan kesehatan masyarakat.

Permasalahan pengelolaan sampah khususnya di wilayah perkotaan dengan jumlah kepadatan penduduk tinggi di Indonesia merupakan masalah atau problema yang terjadi sepanjang waktu yang berjalan seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk di wilayah tersebut yang mengakibatkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan oleh manusia di wilayah perkotaan tersebut. Pernyataan tersebut senada dengan ungkapan Kardono, (2007 :631), yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia disebabkan oleh beberapa indikator yakni tingginya angka jumlah sampah, tingkat pelayanan pengelolaan sampah, kebijakan yang dihasilkan oleh institusi pengelolaan sampah, kapasitas tempat pembuangan sampah akhir, dan permasalahan biaya pengelolaan. Selain ungkapan tersebut, Hadi, (2005 :47), juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kota besar yang mengalami permasalahan lingkungan dan sosial karena adanya TPA di sub- wilayah, pada wilayah tersebut, contoh dari kota-kota tersebut adalah Jakarta yang memiliki TPA di Bantar Gebang, kemudian Surabaya yang mengalami permasalahan wilayah TPA di Keputih, dan Sukolilo, dan Kota Semarang di Jati Barang.

Salah satu wilayah dengan permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia adalah Kota Mojokerto. Kota Mojokerto merupakan kota dengan kepadatan penduduk tinggi di Indonesia, hal tersebut dikarenakan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Mojokerto yakni 133.272 jiwa, sedangkan dengan luas wilayah yakni 20,21 m² berarti kepadatan penduduk Kota Mojokerto adalah 6.594 orang per m², (Badan Pusat Statistik

Kota Mojokerto, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizani, (2016 :65), pengelolaan sampah di Kota Mojokerto merupakan pengelolaan sampah dengan menggunakan model paradigma lama yakni sistem kumpul, angkut, dan buang menuju TPA. Hal tersebut menyebabkan terjadinya tumpukan sampah di TPA Randegan, yang berada di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mojokerto telah diregulasikan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto no 1 Tahun 2021 mengenai pengelolaan sampah.

Penelitian tersebut melanjutkan bahwa Pengelolaan sampah di Kota Mojokerto dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Produksi Sampah Kota Mojokerto per hari sebanyak 349 m³/hari. Pelayanan sampah 78,2 % per hari sebanyak 273 m³/hari. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan perkotaan yang paling banyak yaitu terdapat pada lokasi perumahan yaitu 213 m³/ hari, yang disusul oleh sarana kota lainnya yaitu pasar 82 m³/ hari, jalan arteri dan kolektor 32 m³/ hari, sekolah 22 m³/ hari, dengan jumlah sampah demikian maka diprediksi bahwa dalam beberapa tahun TPA Randegan tidak mampu menampung sampah yang dioperasikan dengan cara lama. Hal tersebut linear dengan ungkapan Mahyudin, (2017 :71), yang menyatakan bahwa selama ini pengelolaan dan pembuangan sampah selalu diarahkan kepada TPA, hal tersebut menyebabkan terjadinya permasalahan kapasitas di TPA, dan resiko pencemaran lingkungan di wilayah sekitar TPA. Berdasarkan pernyataan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis optimalisasi terhadap cara penanggulangan sampah di Kota Mojokerto.

Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 18 Tahun 2008, mengenai pengelolaan sampah, sampah merupakan limbah hasil kegiatan manusia yang berbentuk padat maupun cair. Menurut Setiawan, Ezra, (2023 :6), sampah diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk yakni: (1) Menurut Jenisnya, sampah dibagi menjadi dua yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai dengan sendirinya melalui peranan bakteri. Jenis kedua adalah sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari benda yang tidak hidup, sampah dengan jenis ini memiliki sifat dan karakteristik yakni tidak dapat terurai dan membusuk dengan sendirinya; (2) Menurut bentuknya sampah dibagi menjadi dua yakni sampah padat dan sampah cair, sampah padat adalah sampah yang memiliki bentuk fisik padat, dan sebaliknya sampah cair merupakan sampah yang memiliki bentuk fisik cair. Sampah menurut kamus istilah lingkungan dikutip dalam Iskandar, (2006 :1), adalah bahan yang tidak memiliki arti dan tidak berharga. Selain itu, menurut Kodotaie, (2005 :216), sampah diartikan sebagai limbah buangan dari aktivitas manusia dalam sektor permukiman, pasar, perumahan, perkantoran, peternakan dan berbagai sektor aktivitas lain. Berdasarkan pernyataan para ahli mengenai sampah, maka dapat diartikan sampah adalah suatu barang yang tidak memiliki nilai guna, yang bersifat organik maupun anorganik, dari hasil aktivitas manusia dari berbagai sektor kehidupan.

Dampak Sampah terhadap Lingkungan Hidup

Menurut Setiawan, Ezra, (2023 :7), sampah memiliki dampak terhadap lingkungan hidup yang dibagi ke dalam tiga dampak yakni: (1) Dampak terhadap kesehatan masyarakat, hal ini berarti

sampah dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan dalam bentuk munculnya penyakit seperti diare, cacangan, dan jamur; (2) Sampah juga berdampak bagi lingkungan seperti polusi udara yang menyebabkan bau tidak sedap, serta tumpukan sampah yang terdapat pada saluran air dapat beresiko menimbulkan bencana banjir; (3) Sampah berdampak pada permasalahan sosial dan ekonomi yakni contohnya penumpukan sampah pada area wisata dapat menimbulkan stigma negatif terhadap pengunjung objek wisata.

TPA Randegan Kota Mojokerto

TPA Randegan merupakan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang berada di Kota Mojokerto sejak tahun 1994. TPA Randegan berada di wilayah Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

Tempat Pemrosesan Akhir Randegan yang berada di Kota Mojokerto merupakan TPA dengan kapasitas penampungan 45 ton sampah dalam waktu sehari, letaknya yang dekat dengan pemukiman penduduk kemudian menyebabkan adanya dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar tempat tersebut. Hal tersebut dikarenakan jumlah sampah besar yang terdapat pada TPA mencemari air di sekitar lokasi. Selain merubah kondisi lingkungan di sekitar wilayah TPA, keberadaan TPA Randegan juga mempengaruhi keadaan sosial penduduk sekitar terutama dalam sektor mata pencaharian yang semula bekerja sebagai peternak, dan kini bergeser menjadi juru parkir dan sopir truk sampah, (Putri, 2019 :2).

Implementasi Kebijakan

Implementasi diartikan sebagai sebuah tindakan yang mengikutsertakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan

yakni manusia, anggaran, dan daya mampu dari organisasi, implementasi dapat dilakukan oleh badan pemerintahan, atau juga badan organisasi swasta, (Widodo, (2010 :88). Pernyataan tersebut dilanjutkan dengan pernyataan George Edward III dalam sumber yang idem, yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang digunakan dalam meninjau risiko keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dilakukan, keempat hal tersebut yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi menurut Edward III merupakan sebuah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, dalam sebuah implementasi kebijakan, proses komunikasi diperlukan agar para implementator kebijakan dapat mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga target kebijakan dapat dicapai dengan segala persiapan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber daya dalam sebuah kebijakan memiliki factor penting dalam implementasi, hal tersebut dikarenakan sumber daya dalam sebuah implementasi kebijakan merupakan penggerak dari kebijakan yang diimplementasikan. Sumber daya dalam sebuah kebijakan dibagi menjadi empat jenis yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan, serta sumber daya kewenangan.

Disposisi merupakan rasa kemauan, keinginan, dan rasa kecenderungan pada diri pegawai administrator public untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Aspek disposisi yang dimunculkan dalam diri implementator kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang mendorong motivasi kerja pegawai seperti tindak promosi birokrasi, pemberian insentif, dan dukungan yang lain guna meningkatkan kinerja dari

pegawai dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai birokrasi yang baik mendukung terjadinya implementasi kebijakan yang baik, hal tersebut berdasar pada kenyataan bahwa birokrasi merupakan sebuah instrument yang diciptakan untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan public, dan birokrasi adalah institusi yang berperan dominan dalam mengimplementasikan kebijakan public dan memiliki peranan yang berbeda dalam masing-masing hirarkinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan jenis kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap implementasi penanggulangan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto di TPA Randegan dengan menggunakan tinjauan teori implementasi kebijakan Edward III. Hal tersebut dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang berupa kata-kata atau numeral yang kemudian dipaparkan untuk menemukan tujuan penelitian. Sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data pada data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data sekunder diambil dengan melakukan pembacaan mendalam pada literatur terdahulu guna mendukung data primer. Teknik pengolahan data menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yakni reduksi, penyajian data, dan penentuan simpulan awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud manifestasi dari perencanaan

yang telah dilakukan yang dalam proses melayani masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dalam proses tersebut melibatkan adanya sumber daya terkait untuk menunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. George Edward III menyatakan terdapat empat aspek yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah implementasi kebijakan, hal tersebut yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan pengantar teori di atas, maka berikut merupakan analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Randegan Kota Mojokerto dengan menggunakan tinjauan analisis implementasi model Edward III.

Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi merupakan aspek krusial dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan atau dengan kata lain mencapai tujuan yang diinginkan melalui adanya kebijakan. Aspek komunikasi yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah oleh TPA Randegan Kota Mojokerto yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto berdasarkan hasil wawancara adalah:

Peneliti: "Bagaimana alur komunikasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di TPA Randegan ini pak?"

Warsiman (47): "Alur komunikasi yang dijalin oleh pihak kami yakni Dinas Lingkungan Hidup dimulai dari lingkungan masing-masing RT dan RW yang terdapat di Kota Mojokerto, bentuk komunikasi tersebut berupa himbauan seperti pengklasifikasian sampah rumah tangga, alur pembuangan sampah rumah tangga ke TPS, serta prosedural pengambilan sampah oleh petugas di masing-masing wilayah untuk kemudian dikelola di Tempat Pembuangan Sementara, setelah tahapan tersebut kami melakukan komunikasi dengan

pihak pengelola TPS di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Mojokerto, hal tersebut berkenaan dengan volume sampah yang disetorkan, jenis sampah, dan permasalahan yang terdapat di masing-masing TPS, komunikasi ini juga dijadikan ajang bagi mereka menyampaikan aspirasi kepada kami perihal permasalahan pengelolaan sampah yang dihadapi,”

Data 1, Hasil wawancara dengan Warsiman (47), staff Dinas Lingkungan Hidup, Kota Mojokerto.

Berdasarkan uraian wawancara pada data 1 tersebut didapatkan informasi bahwa pihak DLH Kota Mojokerto selaku pengelola TPA Randegan, menjalin komunikasi dengan pihak-pihak seperti lingkungan Rukun Tetangga, dan Rukun Warga di masing-masing wilayah di Kota Mojokerto, selain itu, pihak DLH juga menjalin komunikasi dengan pihak pengelola TPS di masing-masing kelurahan di Kota Mojokerto. Tujuan diadakannya komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mojokerto pada TPA Randegan tersebut sesuai dengan teori implementasi Edward III adalah: (1) Menginformasikan, hal tersebut berarti komunikasi yang diadakan oleh pihak DLH dengan pihak terkait yakni RT, RW, dan pengelola TPS memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, yang menyangkut tujuan, sasaran, dan proses implementasi, serta prosedural implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang memuat adanya pengelolaan sampah dari masing-masing rumah tangga, ke Tempat Pembuangan Sementara, sampai pada hilir yakni Tempat Pemrosesan Akhir yakni TPA Randegan; (2) Komunikasi yang diadakan oleh pihak DLH kepada RT, RW, dan pengelola TPS di Kota Mojokerto memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan

memahami dengan jelas tupoksi masing-masing implementator kebijakan, termasuk tanggung jawab setiap pihak dan bagaimana kebijakan tersebut akan memengaruhi pihak-pihak tersebut secara langsung atau tidak langsung; (3) Evaluasi dan penyesuaian, hal tersebut berarti kegiatan komunikasi yang dilakukan menjadi kesempatan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto untuk menjangkau aspirasi dari implementator kebijakan serta kesempatan untuk mendengarkan masukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di masing-masing skala wilayah di Kota Mojokerto. Berdasarkan uraian tersebut maka komunikasi adalah instrumen kunci dalam sebuah implementasi kebijakan dikarenakan dapat membantu memastikan kesuksesan dari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mojokerto.

Aspek Sumber Daya

Sumber daya merupakan instrumen kunci dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud dapat termasuk sumber daya manusia dan sumber daya prasarana. Sumber daya manusia dalam mengelola sampah di TPA Randegan berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di TPA Randegan Sumber Daya Manusia pengelola sampah di TPA tersebut masih kurang, hal tersebut ditandai dengan adanya jumlah pekerja dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemulung liar yang ada di kawasan tersebut. Pemulung liar yang terdapat di wilayah TPA Randegan tidak mengerti perosedural pengelolaan sampah, dan beresiko atau memiliki potensi resiko menggagalkan strategi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, karena sampah yang sudah berada di kawasan TPA, oleh para pemulung dibawa lagi keluar untuk didistribusikan secara tidak jelas dan

tidak ada prosedural. Sumber daya peralatan atau sarana dan prasarana yang ada di TPA Randegan sesuai dengan hasil observasi peneliti yakni :

1. Kantor Operasional yang difasilitasi dengan peralatan kantor seperti alat tulis, unit komputer, meja dan kursi, papan untuk presentasi rapat, dan peralatan lain yang diperlukan guna kebutuhan administrasi TPA Randegan.

2. Garasi alat berat, yang merupakan lahan tertutup sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat berat seperti eskavator dan bego yang dimiliki oleh TPA Randegan sebagai bentuk sumber daya alat.

3. Pencucian kendaraan berarti mandiri, hal tersebut berarti TPA Randegan telah memiliki pencucian alat-alat berat dengan peralatan sendiri seperti mesin pompa air, selang, dan lain-lain guna pembersihan beserta dengan petugas kebersihan alat berat.

4. Terdapat fasilitas publik di lokasi TPA Randegan untuk mewujudkan TPA yang edukatif dan ramah keluarga, fasilitas publik tersebut yakni ruang bermain anak, perpustakaan yang disertai ruang baca, serta ruangan yang menyediakan kebutuhan penelitian dan observasi terhadap TPA Randegan.

5. Pengolahan kompos yang disebut dengan rumah kompos, TPA Randegan telah menyediakan ruangan besar berbentuk rumah guna pengolahan sampah-sampah yang dapat dikonversi menjadi kompos.

6. Pengolahan biogas, TPA Randegan juga dapat mengonversi gas methana pada sampah yang kemudian dikonversi menjadi bahan bakar guna membantu warga sekitar TPA Randegan yang dapat digunakan untuk memasak, dan sebagainya.

Aspek Disposisi

Disposisi merupakan sebuah sikap yang menyatakan adanya dukungan dari pelaksana kebijakan terhadap proses implementasi

kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan, konsep disposisi menjadi penting karena dapat memengaruhi bagaimana individu atau kelompok bereaksi terhadap kebijakan yang diusulkan atau dilaksanakan. Disposisi yang positif dapat mempercepat penerimaan dan implementasi kebijakan, sementara disposisi yang negatif dapat menyebabkan resistensi atau bahkan sabotase terhadap kebijakan tersebut. Dalam teori implementasi kebijakan Edward III, aspek disposisi ini sering diperhitungkan dalam memahami dinamika implementasi kebijakan. Para peneliti memperhatikan bagaimana disposisi individu atau kelompok dapat memengaruhi proses implementasi, termasuk sejauh mana kebijakan dapat berhasil diterapkan dan diadopsi oleh pihak-pihak yang terlibat. Aspek disposisi yang terdapat pada implementator kebijakan pengelolaan sampah di TPA Randegan, Kota Mojokerto didapatkan dari hasil wawancara dengan staff Dinas Lingkungan Hidup, Kota Mojokerto:

Peneliti: "Bagaimana cara atau strategi yang diterapkan oleh DLH Kota Mojokerto dalam mencapai aspek disposisi masing-masing pegawai implementator yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mojokerto?"

Warsiman (47): "Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Mojokerto ini menggiatkan aspek disposisi yang seperti sampean sampaikan tadi, berarti menyangkut semangat kerja kan begitu. DLH memiliki strategi dengan adanya bonus baik berupa insentif tunai atau bonus lain seperti rekreasi atau makan syukuran ketika sebuah target kerja sudah terlampaui, dengan hal tersebut para pegawai sebagai implementator kebijakan jadi semangat dan dari situ muncul ide atau langkah-langkah dalam

mempengaruhi kebijakan kerja secara positif.”

Data 2, Wawancara mengenai aspek Disposisi pada pengelola TPA Randegan Kota Mojokerto.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka aspek disposisi yang terdapat pada para implementator kebijakan penanggulangan sampah di TPA Randegan, Kota Mojokerto memiliki peranan yakni: (1) Mempengaruhi penerimaan kebijakan, Disposisi individu atau kelompok terhadap kebijakan dapat memengaruhi sejauh mana kebijakan tersebut diterima atau ditolak. Disposisi yang positif cenderung meningkatkan kemungkinan penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan, sementara disposisi yang negatif dapat menyebabkan resistensi atau penolakan; (2) Menggerakkan tindakan atau kelakuan, disposisi juga dapat mempengaruhi tindakan atau kelakuan individu atau kelompok terkait implementasi kebijakan. Jika disposisi para pengelola sampah di TPA Randegan positif, maka kerja lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi kebijakan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Aspek Struktur Birokrasi

Uraian struktur birokrasi yang terdapat pada TPA Randegan Kota Mojokerto merupakan pernyataan hukum berupa Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi dan tata kerja DLH Kota Mojokerto, (DLH, 2018 :5), yang menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan Kepala Dinas. Kepala Dinas DLH Kota Mojokerto dibantu oleh seorang sekretariat, dan tiga kepala bidang yakni Bidang Penataan dan Pentaatan, Bidang Kebersihan, dan

bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Hidup Lingkungan. TPA Randegan dalam tatanan DLH Kota Mojokerto merupakan bagian dari bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup yang di dalamnya terdapat seksi pengelolaan TPA. Berdasarkan pernyataan tersebut maka struktur birokrasi yang terdapat pada TPA Randegan merupakan dipimpin oleh kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir. Struktur birokrasi tersebut berperan dalam hal: (1) Pelaksanaan kebijakan, yakni menyatakan bahwa kepala seksi Pengelolaan TPA memiliki tanggung jawab terhadap kepala bidang penataan lingkungan hidup sebagai atasannya; (2) Alur pemberian sumber daya, yang berarti ketika kepala seksi pengelolaan TPA Randegan membutuhkan suatu perihal maka harus melalui kepala bidang penataan lingkungan hidup terlebih dahulu. Alur yang terdapat tersebut mengadakan sebuah koordinasi antardepartemen yang positif dan memastikan adanya kolaborasi yang efektif untuk melaksanakan kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Randegan Kota Mojokerto dengan menggunakan tinjauan analisis implementasi Edward III didapatkan kesimpulan bahwa tindakan komunikasi yang dilakukan oleh implementator kebijakan berperan dalam hal penginformasian, pengedaran pemahaman, dan evaluasi serta penyesuaian. Aspek sumber daya terbagi atas dua hal yakni sumber daya manusia dan sumber daya peralatan, dengan hasil penelitian berupa: jumlah sumber daya manusia kurang, sedangkan sumber daya alat atau sarana prasarana mencukupi. Aspek disposisi berperan dalam mempengaruhi penerimaan

kebijakan, dan menggerakkan tindakan atau kelakuan dari para implementator kebijakan. Aspek struktur birokrasi berperan dalam hal pelaksanaan kebijakan dan alur penerimaan sumber daya .

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, R, Salsabila, H, Malik, A. (2018). Pemahaman tentang Lingkungan Berkelanjutan. *E-Journal Undip*, 18(2), pp 75-82.

Hadi, S, P. (2005). Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Iakandar, A. (2006). Daur Ulang Sampah. Jakarta: Azka Mulia Media.

Kardono. (2007). *Integrated Solid Waste Management in Indonesia. Proceedings of International Symposium on Eco/Top Science*. ISETS07 :629-633.

Kodoatie, Robert J. (2003). Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahyudin, P, R. (2017) Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) *Study of Waste Problems and Landfill Enviromental Impact. Jukung: Jurnal Teknik Lingkungan*, 3(1), pp 66-74.

Manik, E, S. (2007). Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Djambatan.

Putri, A, I. (2022). Dampak Keberadaan TPA Randegan Terhadap Kondisi Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. *Jurnal Swara Bhumi*, 1(1), pp 1-5.

Rizani, M, D. (2016). Strategi Pengelolaan Persampahan di Wilayah Perkotaan dalam Mencapai Target Layanan: Studi Kasus Pengelolaan Persampahan di Kota Mojokerto. *The 3rdUniversty Research Coloquium 2016*.

Setiawan, Ezra, A. Perancangan Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Teknologi Modern. Skripsi S1, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.